

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Aplikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan

Vina Dwiana Putri¹⁾, Soni Fajar Surya Gumilang²⁾, Ryan Adhitya Nugraha³⁾

^{1, 2, 3)}Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom

Jl. Telekomunikasi No 1, Bandung

e-mail: vinadwianap@gmail.com¹⁾, mustonie@telkomuniversity.ac.id²⁾, ranugraha@telkomuniversity.ac.id³⁾

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan salah kabupaten di Jawa Barat yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kuningan mencatat bahwa nilai indeks SPBE Kabupaten Kuningan masih belum mencapai target yang dikarenakan penerapan SPBE di Kementerian atau Lembaga atau Daerah yang belum terintegrasi dan masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu agar nilai indeks SPBE mencapai target perlu adanya sebuah aplikasi yang mampu mengintegrasikan data serta informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Dalam penelitian ini akan membahas perancangan Arsitektur Enterprise domain aplikasi sebagai solusi dari permasalahan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Perancangan Arsitektur Enterprise pada penelitian ini mengacu pada penggunaan framework TOGAF ADM. Penelitian ini menghasilkan artefak berupa katalog aplikasi, yaitu berupa rancangan blueprint Arsitektur Enterprise pada domain aplikasi yang menjelaskan mengenai gambaran umum usulan proyek dalam mendukung proses bisnis dan layanan pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Usulan aplikasi berupa aplikasi Eksisting dan Targeting yang saling terintegrasi dalam menjalankan suatu layanan fungsional yang bersifat spesifik pada instansi pusat atau pemerintah daerah dan sektor strategis lainnya dengan membuat pengembangan suatu aplikasi yang sudah ada serta melakukan pembuatan aplikasi baru.

Kata Kunci: Arsitektur Enterprise; Domain Aplikasi; SPBE;

ABSTRACT

The Kuningan Regency Government is one of the regencies in West Java that implements the Electronic-Based Government System, hereinafter abbreviated as SPBE, based on Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE) for administering a government that uses ICT to provide services to SPBE users. The Evaluation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Kuningan Regency noted that the SPBE index value of Kuningan Regency had not yet reached the target due to the implementation of SPBE in Ministries or Institutions or Regions that had not been integrated and were still being implemented separately. To achieve the target, it is necessary to have an application that is able to integrate data and information available to the Kuningan Regency Government. In this study, we will discuss the design of the application domain Enterprise Architecture as a solution to the problems that exist in the Kuningan Regency Government. Enterprise Architecture design in this study refers to the use of the TOGAF ADM framework. This research produces an artifact in the form of an application catalog, in the form of a blueprint design for Enterprise Architecture in the application domain, which explains the general description of the proposed project in supporting business processes and services at the Kuningan Regency Government. Proposed applications in the form of existing and targeted applications that are integrated with each other in carrying out functional services that are specific to central or local government agencies and other strategic sectors by developing an existing application and making new applications.

Keywords: Application domain; Enterprise Architecture; SPBE;

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sedang mengalami perkembangan yang mencakup proses penggunaan sebagai *tools* dalam pengelolaan sebuah informasi [1]. Berkembangnya teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik dalam mencari sebuah informasi ataupun dalam mendapatkan sebuah informasi, yang efektif kapanpun dan dimanapun [2]. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu teknologi yang tidak terpisahkan dengan segala kegiatan yang ada pada proses bisnis dimana di dalamnya terdapat pemrosesan, pengelolaan, dan transfer data dan informasi antar media [3]. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kini masyarakat memiliki keinginan yang lebih tinggi terkait pelayanan pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pelayanan publik secara mandiri dan mudah. Tingginya keinginan masyarakat mewajibkan pemerintah untuk lebih lagi terbuka dalam memberi akses

informasi terkait pemerintahan [4]. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah harus memberikan perhatian utama, karena pelayanan publik merupakan suatu layanan yang menjadi kebutuhan serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dari pemerintah [5]. Tidak dapat dibantahkan, bahwa infrastruktur TIK dan aplikasi diciptakan dengan maksud untuk mewujudkan suatu cara kerja yang efektif, efisien dan akurat [6].

Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* yaitu penggunaan TIK untuk mendukung layanan yang ada pada instansi pemerintah, ASN, pelaku bisnis, dan masyarakat [7]. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu landasan yang menggambarkan tentang integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan sebuah layanan SPBE yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.

Agar tercapainya sebuah tujuan bersama, maka pemerintah perlu adanya penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengembangkan kerja sama antar instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dalam penggunaan SPBE diperlukan penggunaan Aplikasi untuk mendukung kinerja atau operasional pemerintah dalam pertukaran data dan informasi. Oleh karena itu seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPBE atau *e-government*.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan *e-government*, pada SPBE terdapat layanan, tata kelola dan kebijakan. Bahasan literatur mengenai SPBE masih sangat sedikit, atau masih menggunakan nama *e-government* [8]. Berdasarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 menjadi awalan pelaksanaan *e-government* di Indonesia, Instruksi Presiden menekankan bahwa pengaruh dari pemanfaatan TIK dalam pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien [9]. Dengan adanya *e-government* memungkinkan suatu hubungan interaksi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian antara pemerintah dengan dunia usaha. Penerapan *e-government* dalam sektor pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan suatu harapan pemerintah daerah untuk menciptakan kualitas pelayanan publik [10]. Selain itu, dengan menerapkan *e-government* diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat kehidupan serta mempercepat akselerasi pembangunan ICT antara daerah, regional, dan nasional [11].

SPBE bertujuan untuk menyelaraskan semua infrastruktur yang ada di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah agar saling terintegrasi. Selain itu, SPBE juga memberikan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE dan menjaga kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah [12]. Dengan dilaksanakannya Evaluasi SPBE diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas proses yang ada serta kapabilitas fungsi penggunaan (TIK) dalam birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah [13]. Agar pelaksanaan SPBE di setiap daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan penilaian atau evaluasi secara teratur untuk mengetahui dan memastikan kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan juga di setiap Pemerintah Daerah [14].

TABEL I
PREDIKAT INDEKS SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Berdasarkan data Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia [15] nilai indeks SPBE di Kabupaten Kuningan hanya sebesar 2,11, yang berarti hanya mendapat predikat cukup.

Untuk mewujudkan suatu mutu pelayanan yang akuntabilitas dan transparansi berdasarkan tujuan RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023 perlu adanya penerapan *e-budgeting*, *e-data*, *e-Sakip*, *e-planning*, *e-Report*, *e-procurement*, *e-monev*, Simpeg, pajak online dalam satuan aplikasi, perijinan online, dimana perlu adanya aplikasi yang saling terintegrasi agar tujuan serta nilai indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat tercapai.

Berdasarkan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE domain Aplikasi, Aplikasi terdiri atas dua bagian yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus, dengan demikian penelitian ini berfokus kepada Perancangan Arsitektur

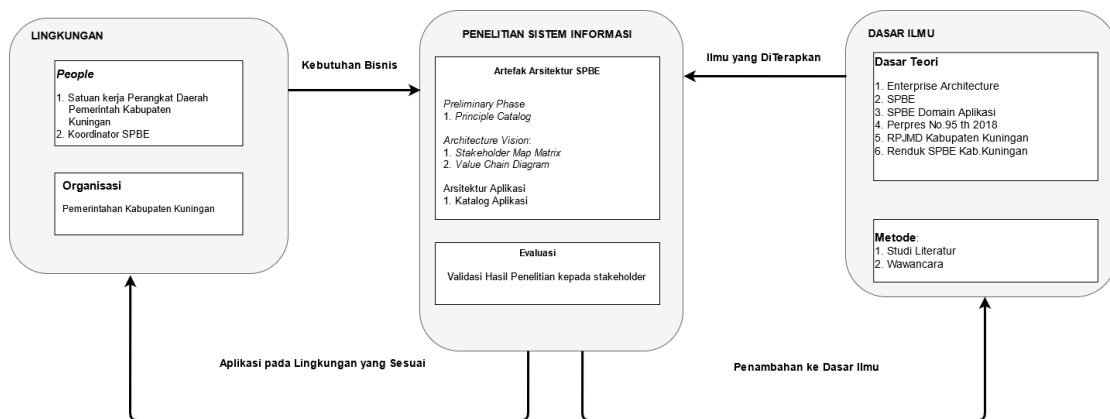
Enterprise pada domain Aplikasi Umum yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Sebagai solusi penggunaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan agar tercapainya visi dan misi serta tujuan yang ada pada RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023, penelitian ini menggunakan *best practice* model implementatif berdasarkan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE untuk membangun Arsitektur Enterprise. Dengan menerapkan Arsitektur Enterprise untuk mendukung SPBE guna pelayanan publik yang efektif dan efisien. Arsitektur Enterprise merupakan dasar untuk menjadi solusi terkait permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi dengan memanfaatkan inovasi TIK.

II. METODE PENELITIAN

A. Model Konseptual

Model Konseptual adalah suatu penggambaran atau model yang berisi elemen-elemen yang berfungsi untuk mengidentifikasi data dalam proses penelitian. Model konseptual ini diharapkan dapat memetakan arahan yang jelas dan terperinci terkait bagian-bagian yang akan menjadi poin penelitian.

Adapun model konseptual dalam perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada domain Aplikasi dibagi menjadi tiga elemen yaitu lingkungan, penelitian sistem informasi, dan dasar ilmu.



Gambar. 1. Adaptasi Framework Penelitian SI

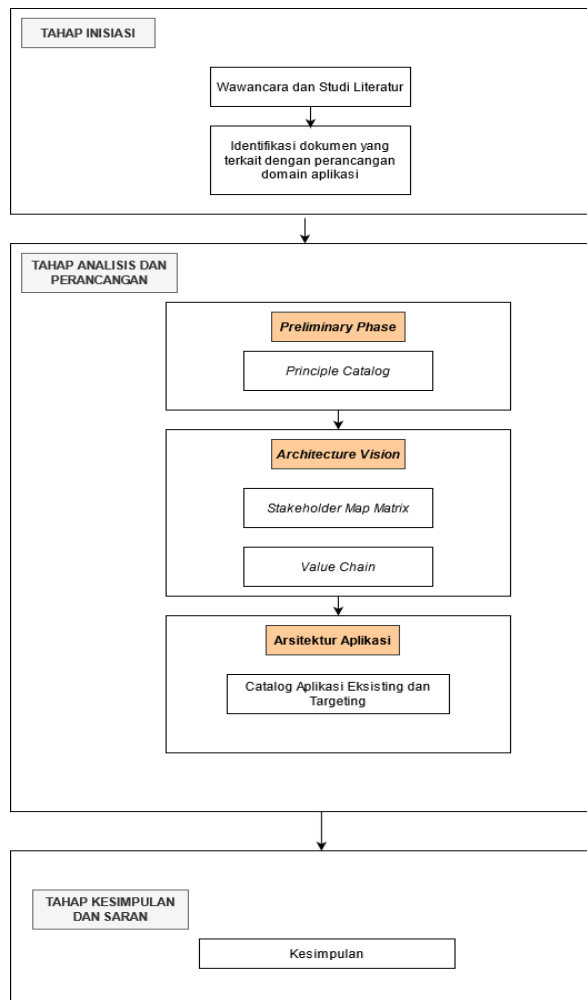
Elemen pertama yang menjadi awalan dari model konseptual ini adalah lingkungan. Pada elemen ini terdapat dua bagian yaitu *people* dan organisasi. *People* disini menggambarkan menguraikan stakeholder terkait penelitian yang berperan sebagai narasumber data dan informasi penelitian seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Koordinator SPBE. Sedangkan organisasi memuat objek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Elemen kedua pada model ini setelah lingkungan adalah penelitian sistem informasi. Elemen ini juga terdiri atas 2 bagian yaitu artefak arsitektur SPBE dan juga evaluasi. Artefak arsitektur SPBE menggambarkan artefak-artefak berdasarkan kerangka kerja TOGAF, namun tidak semua artefak digambarkan, pada penelitian ini hanya berfokus pada dua fase yaitu Fase *Preliminary Phase*, *Architecture Vision* dan *Application Architecture*. Bagian selanjutnya yaitu evaluasi yang berfungsi untuk memastikan kesesuaian penelitian dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kuningan itu sendiri. Untuk dapat mengevaluasi rancangan EA dalam penelitian ini dibutuhkan yaitu validasi stakeholder. Validasi merupakan tahap untuk pengesahan serta suatu tindakan pembuktian kebenaran data, laporan, pernyataan, dan lain sebagainya yang telah ditulis dalam penelitian. Pada tahap ini, penulis melakukan validasi hasil penelitian kepada stakeholder terkait. Stakeholder terkait yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Kuningan dan Koordinator SPBE.

Elemen terakhir dalam model konseptual ini yaitu dasar ilmu. Dasar ilmu memuat dasar teori dan metode penelitian. Adapun dasar teori yang digunakan yaitu *Enterprise Architecture*, SPBE, SPBE domain aplikasi, Perpres No. 95 Tahun 2018, RPJMD Kabupaten Kuningan, dan Renduk SPBE Kabupaten Kuningan. Adapun dalam pelaksanaannya penelitian ini memerlukan dua metode penelitian yaitu studi literatur dan wawancara. Untuk ketiga elemen pada metode konseptual ini seperti pada Gambar. 1. Adaptasi Framework Penelitian SI.

B. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan suatu penggambaran dari sebuah alur atau tahapan yang dilakukan untuk melakukan sebuah perancangan *Enterprise Arhitecture* Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kab. Kuningan di dalam alur penelitian bidang sistem informasi. Sistematika penelitian ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap inisiasi, analisis dan perancangan, dan yang terakhir kesimpulan.



Gambar. 2. Sistematika Penelitian

Tahap Inisiasi. Pada tahap inisiasi terdapat beberapa proses yang dilakukan. Dimana proses pertama yang dilakukan sebagai bentuk perencanaan dalam melakukan sebuah penelitian. Pada proses ini diawali dengan pengenalan SPBE dengan melakukan wawancara stakeholder terkait dan studi literatur yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan melakukan identifikasi dokumen terkait seperti RPJMD Kabupaten Kuningan, Rencana Strategi SKPD, PermenPANRB No. 32 Tahun 2020, dan Aplikasi *Eksisting* yang ada pada pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Tahap Analisis dan Perancangan. Tahap selanjutnya merupakan tahap pengidentifikasian kondisi arsitektur saat ini dan perancangan target arsitektur untuk fungsi yang telah dipilih berdasarkan pada fase yang ada pada TOGAF ADM sebagai kerangka kerja yang dipilih untuk merancang Arsitektur Enterprise pada Pemerintahan Kabupaten Kuningan. *Preliminary Phase* menggambarkan inisiasi aktivitas-aktivitas dan persiapan perancangan EA SPBE di Pemerintah Kabupaten Kuningan, dengan melakukan pendefinisian kerangka kerja arsitektur aplikasi sesuai dengan kebutuhan proses bisnis yang ada pada pemerintah Kabupaten Kuningan dan pendefinisian prinsip-prinsip aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kuningan. *Architecture Vision* tahapan awal dalam perancangan EA SPBE di Pemerintahan Kabupaten Kuningan. Termasuk didalamnya penentuan ruang lingkup arsitektur yang akan dibangun, pada fase ini terdapat *Stakeholder* yang ada di Pemerintah Kabupaten Kuningan dan *Value Chain Diagram* berdasarkan proses bisnis maupun kegiatan yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Arsitektur Aplikasi. Arsitektur ini merupakan fase dimana dilakukan identifikasi terhadap aplikasi yang digunakan dan yang dibutuhkan kedepannya oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pada fase ini menghasilkan sebuah artefak, yaitu Katalog Aplikasi yang menjabarkan mengenai aplikasi apa saja yang ada di Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Tahap Kesimpulan. Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari seluruh tahap penelitian. Dimana pada tahap ini akan dihasilkan dokumen berupa model perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintahan Kabupaten Kuningan berdasarkan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE. Kemudian ada penyusunan kesimpulan dibuat untuk menjawab permasalahan yang diangkat melalui penelitian ini dan saran yang ditulis penulis untuk kelanjutan penelitian dari perancangan *Enterprise Architecture*. Untuk ketiga tahap pada sistematika penelitian ini seperti pada Gambar. 2. Sistematika Penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Preliminary Phase

Preliminary Phase merupakan salah satu fase dalam perancangan *Enterprise Architecture* dimana pada fase ini menjelaskan tentang rancangan *Enterprise Architecture* dalam fungsi Pengelolaan Informasi yang akan dibuat sebagai dasar kebutuhan penunjang berlangsungnya penelitian.

1. Principle Catalog

Principle Catalog ini menjelaskan prinsip aplikasi yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menjalankan proses bisnisnya Berikut merupakan susunan *Principle Catalog* pada Pemerintah Kabupaten Kuningan.

TABEL II
PRINCIPLE CATALOG

No	Prinsip	Deskripsi
1	<i>Technology Independent</i>	Aplikasi tidak bergantung pada pilihan teknologi tertentu sehingga dapat dioperasikan pada berbagai platform.
2	<i>Ease-of-Use</i>	Aplikasi mudah digunakan. Teknologi yang mendasarinya transparan bagi pengguna, sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada tugas yang dihadapi

B. Architecture Vision

Architecture Vision adalah fase awal pada perancangan Arsitektur Enterprise dengan menggunakan TOGAF ADM. Pada fase ini menjelaskan mengenai batasan arsitektur dalam perancangan EA seperti identifikasi kebutuhan manajemen, ruang lingkup, struktur organisasi, pengidentifikasian stakeholder yang mendukung perancangan EA pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Artefak yang dihasilkan pada fase ini yaitu *Stakeholder Map Matrix* dan *Value Chain Diagram*.

1. Stakeholder map matrix

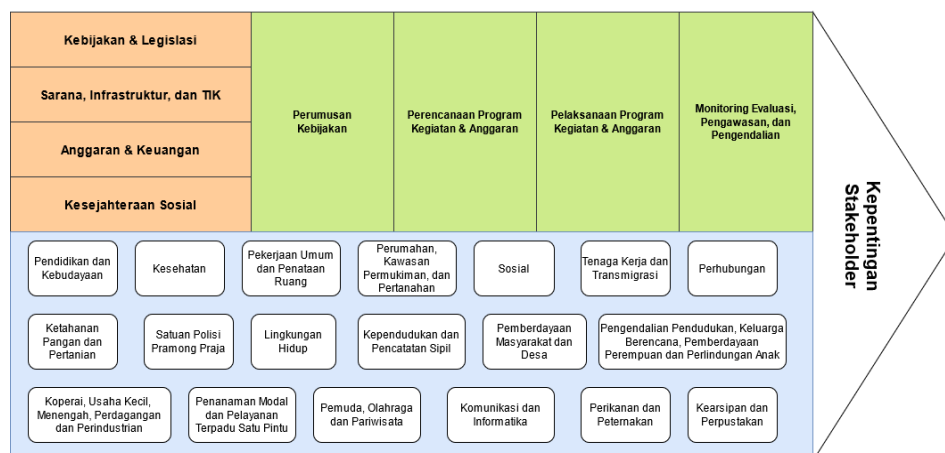
Stakeholder map matrix menjelaskan deskripsi dari setiap stakeholder dalam proses bisnis yang berjalan. Setiap stakeholder menjelaskan tugas-tugasnya dan dampak keputusannya dalam jalannya bisnis di perusahaan. Dibawah ini menjelaskan keterlibatan dari setiap stakeholder dengan concern-nya pada penelitian.

TABEL III
TIM KOORDINASI SPBE

No	Perangkat Daerah	Deskripsi
1	<i>Bupati</i>	Aplikasi tidak bergantung pada pilihan teknologi tertentu sehingga dapat dioperasikan pada berbagai platform.
2	Sekretaris Daerah	Mengkoordinasikan penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan serta mengkoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Penda lain
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengelola arsitektur SPBE, mengkoordinasikan infrastruktur TIK dan pembangunan aplikasi, serta melaksanakan manajemen aset Layanan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mengkoordinasikan integrasi proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
5	BAPPEDA	Bertugas untuk mengatur dalam perencanaan SPBE serta mengkoordinasikan manajemen data dan tata kelola data
6	BPKAD	Mengkoordinasikan penganggaran SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

2. Value Chain Diagram

Value Chain Diagram menggambarkan value yang dimiliki oleh suatu organisasi berdasarkan proses bisnis maupun kegiatan yang ada pada suatu organisasi. *Value Chain Diagram* terdapat dua aktivitas yaitu, aktivitas utama (primary activities), aktivitas utama tersebut berdasarkan Perda Kabupaten Kuningan No.10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan dan juga aktivitas pendukung (support activities) yaitu aktivitas pendukung manajerial yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Gambar 3 dibawah ini merupakan gambar *value chain diagram* yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kuningan.



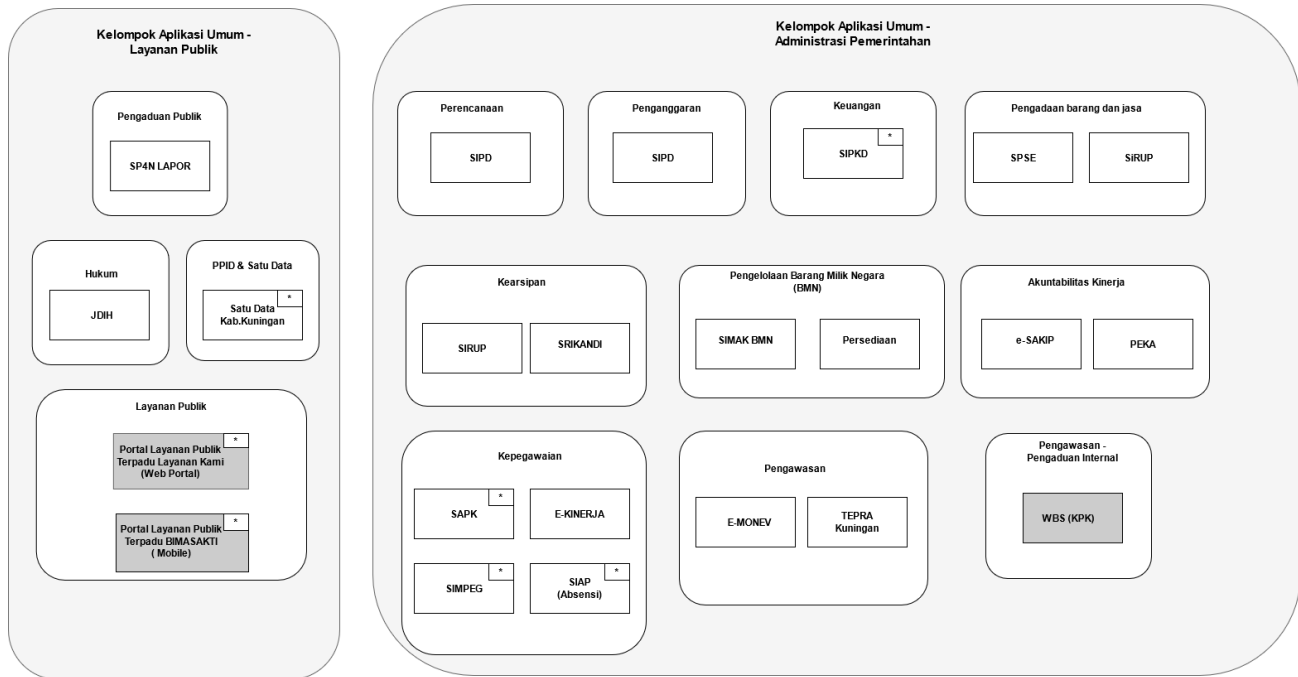
Gambar. 3. Value Chain Diagram

C. Arsitektur Aplikasi

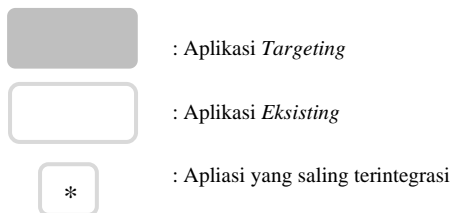
Katalog Aplikasi merupakan suatu pengelompokan aplikasi yang digunakan pada Pemerintah Kab. Kuningan yang digambarkan melalui diagram pemetaan. Aplikasi Umum dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aplikasi

umum layanan administrasi pemerintahan dan aplikasi umum layanan publik serta Aplikasi Khusus dikelompokkan berdasarkan unit kerja/perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Kab. Kuningan.

Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 [7] tentang SPBE Aplikasi Umum yang terdiri dari Aplikasi Umum Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan pada Kabupaten Kuningan, Layanan publik berbasis elektronik adalah sebuah Layanan SPBE yang menunjang perwujudan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang yang sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.



Gambar 4. Pemetaan Aplikasi Umum Kabupaten Kuningan



Gambar Pemetaan di atas merupakan gambaran kondisi eksisting dan aplikasi targeting pada aplikasi umum di Kabupaten Kuningan. Dimana pada aplikasi targeting penulis mengusulkan untuk Aplikasi Umum Target Kabupaten Kuningan diarahkan untuk penggunaan aplikasi umum berbagi pakai SPBE Nasional. Keseluruhan aplikasi umum target ini digunakan untuk seluruh unit kerja di lingkungan Kabupaten Kuningan. Dilakukan penyeragaman aplikasi yang mengelola fungsi yang sama, sehingga tidak terjadi duplikasi aplikasi umum di unit kerja pengguna.

Dengan melakukan analisa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kuningan dari domain aplikasi berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 yang bertujuan terwujudnya suatu aplikasi *Eksisting* dan *Targeting* yang saling terintegrasi dalam menjalankan suatu layanan fungsional yang bersifat spesifik pada instansi pusat atau pemerintah daerah dan sektor strategis lainnya dengan membuat pengembangan suatu aplikasi yang sudah ada serta melakukan pembuatan aplikasi baru. Aplikasi *Targeting* yang dihasilkan yaitu Aplikasi *Targeting* Baru dan Aplikasi *Targeting* Pengembangan. Aplikasi *Targeting* penelitian ini yaitu, Aplikasi E-WBS kuningan, Portal Website LayananKami, dan Aplikasi *Mobile* Kuda SiWindu. Portal Website LayananKami dan Aplikasi *Mobile* Kuda SiWindu merupakan layanan satu pintu yang ada pada Pemda Kabupaten Kuningan, dimana pada aplikasi tersebut dapat menjadi solusi permasalahan yang ada, yaitu

terwujudnya suatu aplikasi yang mampu mengintegrasikan aplikasi layanan publik pada Pemda Kabupaten Kuningan.

IV. KESIMPULAN

Perancangan Arsitektur Enterprise SPBE penelitian ini menggunakan referensi TOGAF ADM yang menekankan pada *Preliminary Phase*, *Architecture Vision*, dan Arsitektur Aplikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa *output* arsitektur aplikasi yang menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pada Pemerintah Kabupaten Kuningan

Pada perancangan *Preliminary Phase* menentukan sebuah prinsip yang harus diimplementasikan dalam perancangan EA pada domain aplikasi. Pada *Architecture Vision* mendefinisikan Stakeholder yang terlibat pada SPBE Kabupaten Kuningan dan *Value Chain Diagram* dimana suatu value yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pada Arsitektur Aplikasi terdapat tahapan yang di dalamnya berupa penggambaran domain aplikasi yang berdasarkan hasil dari artefak *Architecture Vision* dan *Preliminary Phase*. Berdasarkan analisis dan perancangan artefak yang telah dibuat maka dapat disimpulkan betapa pentingnya suatu aplikasi dalam sebuah pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendukung layanan publik di penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Tentang, W. E. B. E. Di, and K. Kota, "Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (studi tentang web e-government di kominfo kota Manado)," vol. VI, no. 3, 2017.
- [2] A. Shafira and A. Kurniaswi, "IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA," vol. 5, no. 1, pp. 52–68, 2021.
- [3] A. Aziz, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Bisnis Pos information technology utilization in business post," vol. 10, no. 1, pp. 35–50, 2012.
- [4] A. Widiyarta, C. E. Windiastuti, and H. I. Robbani, "Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pelayanan Administrasi (SIOLA) Di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia," *Public Adm. J. Res.*, vol. 2, no. 5, 2020.
- [5] E. S. Holle, "Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service," vol. 17, no. 3, pp. 21–30, 2011.
- [6] G. Maturity, M. Kasus, K. Gorontalo, A. A. Bouty, M. H. Koniyo, and D. Novian, "Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E- EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK MENGGUNAKAN E-GOVERNMENT MATURITY MODEL (KASUS DI PEMERINTAH KOTA GORONTALO) THE EVALUATION OF ELECTRONIC BASED GOVERNMENT SYSTEM USING E-GO," no. November, 2019, doi: 10.33299/jpkop.23.1.1758.
- [7] P. R. Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik," 2018.
- [8] Y. Hanum, P. Pascasarjana, S. Budaya, and U. Gunadarma, "Keterkaitan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan pendapatan asli daerah," vol. 25, no. 2, pp. 136–142, 2019.
- [9] M. P. Damanik and E. H. Purwaningsih, "E-Government dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)," *J. Stud. Komun. dan Media*, vol. 21, no. 2, p. 151, 2017.
- [10] Z. Fahlefi, A. Mahasiswa, P. Magister, I. Administrasi, and F. U. Mulawarman, "Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada BP2TSP Kota Samarinda) Zul Fahlefi," pp. 155–166, 2007.
- [11] A. Habibullah, "Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government," vol. 23, no. c, pp. 187–195, 2010.
- [12] H. D. Pratiwi, W. Hayuhardhika, N. Putra, and A. D. Herlambang, "Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," vol. 4, no. 11, pp. 4116–4124, 2020.
- [13] P. Dipa, P. Pratiwi, G. Agung, A. Putri, G. Made, and A. Sasmita, "Evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan Salah Satu Kabupaten di Bali," vol. 1, no. 2, 2020.
- [14] M. R. Y. Saputra, W. W. Winarno, and Henderi, "Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE Di Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMII Dev. Versi 1.3," vol. 3, no. 1, pp. 3–9, 2020.
- [15] D. A. N. Reformasi and B. Republik, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik," 2020.